

LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : SK. TIM PENYUSUN LKjIP TAHUN 2017



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : W23-U/53 /SK/KPT/KP.01/2/2018

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017

KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 perlu membentuk tim penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai tim penyusunan laporan tersebut.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Permen PAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Memperhatikan** : 1. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 November 2017 perihal Penyampain LKjIP Tahun 2017 Dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk tim untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 sebagaimana dalam lampiran surat Keputusan ini ;
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;
- Ketiga : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : K E N D A R I
PADA TANGGAL : 05 FEBRUARI 2018

KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA,



H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 19580821 198403 1 001

Tembusan : Kepada Yth.

1. Y.M. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Y.M. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta;
3. Y.M. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta;
4. Ketua Area 6 Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Arsip.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
NOMOR W23.U/ 53 /SK/KPT/KP.01/2/2018
TENTANG SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017

Pembina : 1. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
2. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Ketua : Panitera

Wakil Ketua : 1. Sekretaris
2. Wakil Panitera

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Rencana Program Dan Anggaran

Anggota : 1. Kepala Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian
2. Kepala Bagian Umum Dan Keuangan
3. Panitera Muda Perdata
4. Panitera Muda Hukum
5. Panitera Muda Pidana
6. Panitera Muda Tipikor
7. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan TI
8. Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Pelaporan
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga

DITETAPKAN DI : K E N D A R I
PADA TANGGAL : 05 FEBRUARI 2018

KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA,



H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H.A
NIP. 19580821 198403 1 001

LAMPIRAN 2 : REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	25%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	
		• Kasasi	50%
		• PK	75%
e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	80%		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%
		b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	100%
3.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	100%
4.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
5.	Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter obyektif	a. Persentase Pejabat/Pegawai yang lulus mengikuti Diklat Tekhnis Yudisial	95%
		b. Persentase Pejabat/Pegawai yang lulus mengikuti Diklat Non Yudisial	95%
		c. Persentase Pejabat/Pegawai yang lulus mengikuti fit and propert test dalam promosi Jabatan	100%
6.	Peningkatan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	Persentase realisasi anggaran dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	95%
7.	Peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	a. Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pendukung sistem informasi penelusuran perkara (SIPP)	100%
		b. Persentase tercapainya target pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran	100%

LAMPIRAN 3 : PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017

NO.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti dan Akuntabel.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	95% 95% 95%	89,75% 93% 100%	94,47% 97,89% 105,26%
		c. Persentase penurunan sisa perkara 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	25% 25% 30%	-11,5% 12,5% 0%	-450% 50% 0%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Kasasi • PK	50% 75%	41,70% 92,71%	83,4% 123,6%
		e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	80%	76,77%	95,96%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	100%	100%	100%
3.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	Persentase perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	100%	Nihil	Nihil
4.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%
		b. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
5.	Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter obyektif	a. Persentase Pejabat/ Pegawai yang lulus Diklat Tekhnis Yudisial	95%	100%	105,2%
		b. Persentase Pejabat/ Pegawai yang lulus Diklat Non Yudisial.	95%	50%	52,63%
		c. Persentase Pejabat/ Pegawai yang lulus mengikuti fit and proper test dalam promosi Jabatan	100%	100%	100%
6	Peningkatan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	a. Persentase realisasi anggaran dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	95%	99,10%	104,3%
7.	Peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan terhadap layanan Pengadilan Tinggi	a. Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pendukung sistem informasi penelusuran perkara (SIPP)	100%	99,77%	99,77%
		b. Persentase tercapainya target pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran	100%	99,77%	99,77%

LAMPIRAN 4 : REVIEW IKU TAHUN 2017

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun + perkara yang masuk) Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{T_{n.1} - T}{T_{n.1}} \times 100\%$ <p>T_n = Sisa perkara tahun berjalan T_{n.1} = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> Kasasi PK 	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Upaya hukum = Banding, kasasi, PK Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan Pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	<p>Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semester dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan : SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah isi putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> One day publish adalah Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diupload ke web dlm 1 hari setelah diputus Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

LAMPIRAN 5 : REVISI KINERJA TAHUNAN 2017

**REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan umum	Penyelesaian perkara pidana ditingkat pertama dan tingkat banding yang tepat waktu	Layanan dukungan penyelesaian perkara peradilan umum	171 perkara	64.814.000
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%					
	c. Persentase penurunan sisa perkara	25%					
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :						
	1. Kasasi	50%					
	2. PK	75%					
	e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	80%					
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Pengiriman salinan putusan kepada	Berkas perkara yang dikirim ke Pengadilan	154 perkara	14.023.542.000
	b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	100%		Pengadilan pengaju tepat waktu dan penginputan putusan melalui SIPP	Pengaju tepat waktu dan Publikasi putusan	5 perkara	
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	100%	Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Penyelenggaraan pelaksanaan Pelayanan peradilan	Pembebasan biaya perkara ditingkat banding	5 perkara	14.023.542.000
Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%		Pengawasan dan penanganan pengaduan masyarakat	Laporan Hasil Pengawasan internal dan Tindak Lanjut Hasil pengaduan masyarakat	14 LHP	
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti	100%				5 LHP	
Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter obyektif	a. Persentase Pejabat/pegawai yang mengikuti Diklat Teknis Yudisial	95%		Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdsarkan parameter obyektif	Jumlah pejabat/pegawai yang mengikuti Diklat Tehknis, Non yudisial dan yang mengikuti fit and propert test	2 orang	
	b. Persentase Pejabat/pegawai yang mengikuti Diklat Non Yudisial.	95%				4 orang	
	c. Persentase Pejabat/pegawai yang lulus mengikuti fit and propert test dalam promosi Jabatan	100%				2 orang	
Peningkatan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	a. Persentase realisasi anggaran dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	95%		Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan	Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel	12 laporan	
Peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	a. Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pendukung sistem informasi penelusuran perkara (SIPP)	100%	Peningkatan sarana dan prasarana			Pengadaan Peralatan dan prasarana pendukung peradilan	pemenuhan sarana prasarana pendukung pelayana peradilan
	b. Persentase tercapainya target pengadan peralatan dan fasilitas perkantoran			6 unit Laptop/ komputer			

LAMPIRAN 6 : MATRIK INVENTARISIR DAN TELAAH DOKUMEN SAKIP TAHUN 2017

